



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BARITO KUALA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala disusun sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan organisasi perangkat daerah selama tahun 2019, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi jangka menengah Kabupaten Barito Kuala tahun 2017 – 2022 yaitu :

Visi :

**“ TERWUUDNYA KABUPATEN BARITO KUALA SATU KATA SATU RASA
MEMBANGUN DESA MENATA KOTA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA “**

Misi :

1. Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Perkotaan.

2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian.
3. Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumberdaya Manusia.
4. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Terbuka dan Melayani.

Sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala dengan kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun.

Hasil pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019.

Marabahan, Januari 2019

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kabupaten Barito Kuala

Dr. Ir. RAHMANUDDIN, MS

NIP. 19650508 199803 1 002

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

LKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini, *Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan* dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sesuai Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka hasil pengukuran terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator kinerja sasaran strategis yang diperjanjikan, dibagi dalam kategori :

- Pencapaian sesuai target sebesar 100%
- Melampaui/melebihi target >100%
- Tidak mencapai target <100%.

Keberhasilan Capaian IKU ditunjukkan pada 3 (tiga) indikator dengan capaian 1 (satu) indikator melebihi target dan 2 (dua) indikator tidak mencapai target.

**CAPAIAN IKU DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2019**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019	
			Target	Realisasi
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor	87	88,00
2.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	84,9	83,80
3.	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	19.716	19.441,84

Berdasarkan Perjanjian Kinerja *Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan* Tahun 2019 ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator sasaran dan mengacu pada misi ke 2 (dua) RPJMD yaitu “Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian”.

“Tabel Pencapaian Target Kinerja Sasaran Tahun 2019”

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian					
				Melampaui Target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
				Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Meningkatnya kemandirian pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	101,15	88	101,15				
2.	Meningkatnya diversifikasi pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	98,70					83,80	97,70
3.	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan	98,61					19.441,84	98,61

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
I. Latar Belakang	1
II. Tugas Pokok dan Fungsi	3
III. Isu Strategis	6
IV. Landasan Hukum	8
V. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	9
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
I. Perencanaan Strategis	10
2.1 Tujuan	10
2.2 Sasaran	10
2.3 Indikator	10
II. Perjanjian Kinerja	11
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
I. Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	16
II. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis	20
III. Akuntabilitas Keuangan	63
IV. Analisa Efisiensi	65
 BAB IV PENUTUP	67

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1.1 Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018-2022	11
Tabel 2.2.1 Perjanjian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019	12
Tabel 3.1 Predikat Nilai Capaian Kinerja	17
Tabel 3.2 Predikat Capaian Kinerja untuk Realisasi Capaian Kinerja yang Tidak tercapai	17
Tabel 3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019	18
Tabel 3.1.2 Capaian IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Berdasarkan Persentase Tahun 2019	19
Tabel 3.1.3 Capaian IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Berdasarkan Kategori Tahun 2019	19
Tabel 3.2.1 Sasaran Strategis dan Jumlah Indikator Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala	21
Tabel 3.2.2 Capaian Kinerja Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019	21
Tabel 3.2.3 Capaian Kinerja Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019	22
Tabel 3.2.4 Pencapaian Target Sasaran Strategis Dinas	23

Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten
Barito Kuala Tahun 2019

Tabel 3.2.5	Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini dengan Capaian Tahun Lalu	61
Tabel 3.2.6	Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Target Renstra	62
Tabel 3.2.7	Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2019 dengan Capaian Provinsi dan Nasional	62
Tabel 3.3.1	Komposisi Belanja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun Anggaran 2019	63
Tabel 3.3.2	Pagu dan Realisasi Anggaran Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2019	64
Tabel 3.3.3	Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019	65
Tabel 3.4.1	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2019	66

I. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu

meningkatkan peran serta fungsi Kepala Dinas sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Barito Kuala di Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten/Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme(KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala diwajibkan untuk menyusun

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 yang dimaksudkan, sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala yang merupakan unsur pelaksana teknis pemerintah daerah dibidang Pangan dan Perikanan sesuai dengan kewenangan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan memiliki **tugas pokok** :

“Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Ketahanan Pangan Dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten”.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan memiliki **fungsi** :

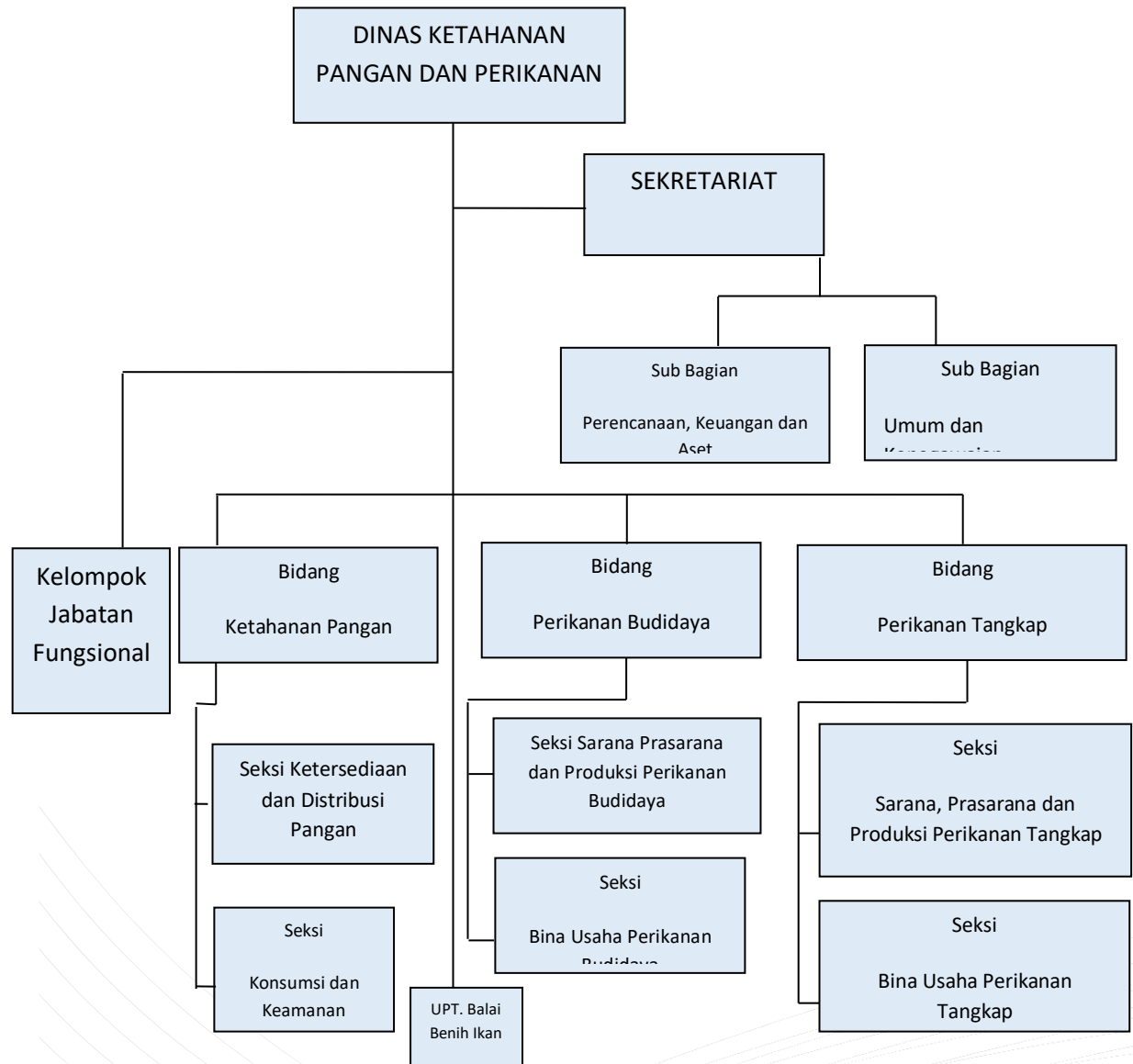
1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan, perikanan budidaya dan perikanan tangkap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

2. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang ketahanan pangan, perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
3. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Ketahanan Pangan dan Perikanan.
4. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan, perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
5. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan dan perikanan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi ketahanan pangan dan perikanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk menunjang pencapaian tugas pokok dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala yang dipimpin oleh Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris, Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Perikanan Tangkap, Kasubbag, Kasi, Kelompok Jabatan Fungsional dan UPTD yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 35 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Susunan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Barito Kuala sebagaimana tergambar pada Struktur Organisasi berikut :

Gambar 1. Bagan Susunan Organisasi

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala



III. ISU STRATEGIS

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala terdapat beberapa **permasalahan**, yaitu :

1. Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Barito Kuala masih rendah karena pola makan masyarakat masih belum beragam, bergizi seimbang dan masih didominasi bahan makan berupa beras.
2. Penanganan distribusi pangan melalui program penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat dalam rangka stabilitas harga belum optimal dan memadai, karena penempatan PLDPM belum merata.
3. Pengawasan keamanan pangan belum optimal, terutama untuk komoditi pangan segar berupa sayuran dan buah buahan.
4. Pencapaian penanganan kerawanan pangan masih belum optimal akibat kurangnya sumberdaya manusia.
5. Penguatan kelembagaan lumbung pangan dan perluasan desa mandiri pangan masih belum maksimal.
6. Kualitas SDM masih rendah, sehingga teknologi usaha perikanan belum bisa dikuasai sepenuhnya.
7. Lemahnya permodalan merupakan masalah klasik belum bisa terpecahkan secara tuntas. Disisi lain lembaga perkreditan/perbankan kurang berminat menyalurkan kredit, karena usaha perikanan dinilai berisiko tinggi.

8. Tumpang tindih pemanfaatan lahan yang terus terjadi, sebagai akibat dari belum optimalnya penyusunan tata ruang dan pengendaliannya.
9. Degradasi sumberdaya perikanan karena eksploitasi yang tidak berwawasan lingkungan maupun dampak dari kegiatan lain, misalnya adanya perkebunan sawit, stockpile batu bara.
10. Mutu produk olahan perikanan yang memiliki mutu rendah sehingga bernilai jual rendah.
11. Perubahan musim yang tidak menentu akibat dari global warming effect (pemanasan global) yang sangat merugikan bagi pembudidaya dan nelayan.
12. Mulai dilaksanakannya AFTA sebagai wujud diawalinya liberalisasi investasi dan perdagangan global (APEC 2010 dan WTO 2020). Sebagai indikasi, saat ini makin meningkatnya akses produk-produk asing terhadap pasar dalam negeri sebagai konsekuensi pelaksanaan perdagangan bebas. Hal ini menyebabkan persaingan produk-produk perikanan yang semakin ketat.

Adapun **Isu Strategis** yang diangkat oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Rencana Strategis 2013 – 2017 adalah sebagai berikut :

- a) Belum optimalnya stok cadangan pangan dan distribusi pangan serta minimnya ketersediaan produk pangan
- b) Belum beragamnya pola konsumsi pangan masyarakat

c) Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya sektor perikanan

Agar pembangunan lima tahun ke depan tidak berjalan sendiri tanpa arah maka diperlukan satu arahan dan persamaan visi yang mengarah pada tindakan penuh kehati-hatian dan sikap arif dari semua pihak agar terjalin pembangunan terkoordinasi dan berdayaguna termasuk pembangunan yang dijalankan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dan instansi lainnya.

IV. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala ini disusun berdasarkan amanat peraturan perundang undangan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018 tentang

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

V. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menyajikan Gambaran Umum, Tugas Pokok dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan Ringkasan Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu, IKU dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan akuntabilitas kinerja yang meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II

I. PERENCANAAN STRATEGIS

Berdasarkan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 118.45/251/KUM/2018 tanggal 04 Juni tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis 2017 – 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala maka tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala adalah :

2.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi SKPD.

2.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

2.3 Indikator

Indikator adalah variable yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu.

Sebagaimana visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel : 2.1.1

**Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Renstra
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala**

Tahun 2018-2022

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan stok cadangan pangan dan kemampuan membangun sistem distribusi pangan serta meningkatkan kemampuan membangun ketersediaan pangan dalam jumlah, mutu, dan keragaman yang cukup	Persentase peningkatan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan (%)	Meningkatnya kemandirian pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan
2.	Meningkatkan diversifikasi konsumsi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman untuk pemenuhan pangan masyarakat	Persentase peningkatan Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (%)	Meningkatnya diversifikasi pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi
3.	Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan (%)	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan

II. PERJANJIAN KINERJA 2019

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting dan perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan, karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh

instansi akan dapat berguna dalam rangka menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program dan kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Tahun 2019 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018-2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019.

Adapun Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel : 2.2.1

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2019**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kemandirian pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor	87	Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian /perkebunan)	714.301.500,-

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Meningkatnya diversifikasi pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	84,9	Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian /perkebunan)	239.875.500,-
	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	19.716	• Pengembangan Budidaya Perikanan • Pengembangan Perikanan Tangkap • Program Pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	• 1.055.119.800,- • 908.600.700,- • 96.558.900,-

Pada tahun 2019 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala memiliki 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu :

- Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan
- Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi
- Jumlah Produksi Perikanan

Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dipengaruhi oleh ketersediaan pangan berupa ketersediaan energi dan ketersediaan protein untuk mengarahkan masyarakat mengkonsumsi pangan yang beragam, karena secara alamiah masyarakat akan mengkonsumsi apa yang tersedia

di lingkungan dan di pasaran. Indikator ini didukung oleh 1 (satu) program utama yaitu Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian /perkebunan) dengan anggaran Rp 714.301.500,-

Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi dipengaruhi pola konsumsi pangan yaitu konsumsi energi dan konsumsi protein yang erat kaitannya dengan jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan, budaya, lingkungan dan peraturan pemerintah. Indikator ini didukung oleh 1 (satu) program utama yaitu Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian /perkebunan) dengan anggaran Rp 239.875.500,-

Indikator Jumlah Produksi Perikanan

Jumlah Produksi Perikanan dipengaruhi oleh capaian produksi perikanan tangkap baik penangkapan di laut dan perairan umum dan capaian produksi budidaya yang berasal dari budidaya tambak, kolam, karamba, karamba jaring apung, minapadi. Indikator ini didukung oleh 2 (dua) program utama yaitu Program Pengembangan Budidaya Perikanan dengan anggaran sebesar Rp. 1.055.119.800,- yang berasal dari dana APBD sebesar Rp. 532.042.800,- dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 523.077.000,00,- dan Program Pengembangan Perikanan Tangkap dengan anggaran sebesar Rp. 908.600.700,- yang berasal dari dana APBD sebesar Rp. 255.547.700,- dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 653.053.000,-. Selain itu juga didukung 1 (satu) program pendukung yaitu Program Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan yang melaksanakan pengolahan hasil produksi perikanan melalui pelatihan pengolahan bagi istri nelayan dengan anggaran sebesar Rp. 96.558.900,-.

Selain program teknis yang mendukung secara langsung terhadap pencapaian indikator kinerja utama, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan juga memiliki empat program pendukung yang dijalankan oleh Bagian Sekretariat. Program-program tersebut adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran Rp. 492.386.000,- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran Rp. 216.679.000,- Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan anggaran Rp. 43.800.000,- dan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan anggaran Rp. 3.140.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2017-2022, RKT Tahun 2019, Renja Tahun 2019, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel. 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

Persentase	Predikat
<100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai/Sesuai target
>100	Melebihi target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Tabel. 3.2
Predikat Capaian Kinerja untuk Realisasi Capaian Kinerja yang Tidak tercapai

No	Kategori	Capaian
1	Sangat baik	>90
2	Baik	75 – 89,99
3	Cukup	65 – 74,99
4	Kurang	50 – 64,99
5	Sangat kurang	0 – 49,99

I. Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Nomor 523.1.1/029/DKPP/2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya kemandirian pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor	87	88,00	101,15
2	Meningkatnya diversifikasi pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	84,9	83,80	98,70
3	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	19.716	19.441,84	98,61

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.1.2
Capaian IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Barito Kuala Berdasarkan Persentase
Tahun 2019

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak tercapai	1
= 100	Tercapai/Sesuai target	1
>100	Melebihi target	1

Dari tabel di atas digambarkan bahwa capaian IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala berdasarkan persentase yang tidak tercapai ada 2 (dua) yaitu Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi dengan persentase 98,70% dan Jumlah Produksi Perikanan dengan persentase 98,61%. Sedangkan IKU yang melebihi target ada 1 (satu) yaitu Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dengan persentase 101,15%.

Tabel 3.1.3
Capaian IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Barito Kuala Berdasarkan Kategori
Tahun 2019

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat baik	>90	3
2	Baik	75 – 89,99	0
3	Cukup	65 – 74,99	0
4	Kurang	50 – 64,99	0
5	Sangat kurang	0 – 49,99	0

Dari tabel di atas digambarkan bahwa capaian IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan berdasarkan kategori ada 3 (tiga) indikator sasaran capaiannya melebihi 90%, sehingga semua indikator sasaran dinas masuk dalam kategori “**Sangat Baik**”

II. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Dalam laporan ini, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Renja Tahun 2019.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala, Nomor 523.1.1/029/DKPP/2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala,

telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Sasaran Strategis dan Jumlah Indikator
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito
Kuala

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya kemandirian pangan	1 indikator
Sasaran Strategis 2	Meningkatnya diversifikasi pangan	1 indikator
Sasaran Strategis 3	Meningkatnya Produksi Perikanan	1 indikator

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan memiliki 3 sasaran strategis yaitu Sasaran Strategis “Meningkatnya kemandirian pangan” dengan 1 indikator sasaran, Sasaran Strategis “Meningkatnya diversifikasi pangan” dengan 1 indikator sasaran dan Sasaran Strategis “Meningkatnya Produksi Perikanan” juga dengan 1 indikator sasaran.

Tabel 3.2.2
Capaian Kinerja Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Sasaran	Predikat
1	Sasaran Strategis 1	1	101,15	Melebihi Target
2	Sasaran Strategis 2	1	98,70	Tidak Tercapai
3	Sasaran Strategis 3	1	98,61	Tidak Tercapai

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa capaian kinerja sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ada 1 (satu) sasaran strategis dengan jumlah 1 indikator sasaran, memiliki rata rata capaian sasaran sebesar 101,15% berpredikat “Melebihi Target”, 2 (dua) sasaran strategis dengan masing masing 1 indikator sasaran, memiliki rata rata capaian sasaran sebesar 98,65% dengan predikat “Tidak Tercapai” yang terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis dengan capaian sasaran sebesar 98,70% dan 1 (satu) sasaran strategis dengan capaian sasaran sebesar 98,61%.

Tabel 3.2.3

**Capaian Kinerja Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2019**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	0 -49,99 Sangat kurang	50 - 64,99 Kurang	65 - 74,99 Cukup	75 - 89,99 Baik	> 90 sangat baik
1.	Sasaran 1	1	101,15	-	-	-	-	√
2.	Sasaran 2	1	98,70	-	-	-	-	√
3.	Sasaran 3	1	98,61	-	-	-	-	√

Dari tabel di atas menggambarkan Capaian Kinerja Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ada 1 (satu) sasaran dengan jumlah 1 indikator dan rata rata capaian kinerja sasaran sebesar 101,15% dengan kategori “sangat baik”; 1 (satu) sasaran dengan jumlah 1 indikator dan rata rata capaian kinerja sasaran sebesar

98,70% dengan kategori “sangat baik” dan 1 (satu) sasaran dengan jumlah 1 indikator dan rata rata capaian kinerja sasaran sebesar 98,61% juga dengan kategori “sangat baik”.

Tabel 3.2.4

Pencapaian Target Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian					
				Melebihi target (>100)		Sesuai target (=100)		Dibawah target (<100)	
				Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1.	Sasaran Strategis 1	1	101,15	√	√	-	-	-	-
2.	Sasaran Strategis 2	1	98,70	-	-	-	-	√	√
3.	Sasaran Strategis 3	1	98,61	-	-	-	-	√	√

SASARAN STRATEGIS 1. MENINGKATNYA KEMANDIRIAN PANGAN

Sasaran “Meningkatnya Kemandirian Pangan” adalah merupakan pengimplementasian dari Misi 2 pada RPJMD yaitu **MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI INOVASI TEKNOLOGI BERBASIS PERTANIAN** pada sasaran RPJMD “Meningkatnya produksi pelaku usaha dan tingkat produktivitas ekonomi masyarakat” dengan indikator RPJMD Indeks Gini dan PDRB per kapita. Untuk merealisasikan sasaran “Meningkatnya Kemandirian Pangan” ditetapkan dengan Indikator Kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan.

Definisi Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan adalah salah satu alat ukur yang digunakan untuk menggambarkan kondisi keberagaman ketersediaan pangan suatu wilayah (makro). PPH ketersediaan pangan adalah jenis dan jumlah kelompok pangan utama yang di anjurkan untuk memenuhi kebutuhan energi dan gizi. Tujuan penyusunan PPH adalah rasionalisasi pola ketersediaan pangan yang dianjurkan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan pangan yang kemudian digunakan sebagai bahan penilaian ketersediaan pangan penduduk (jumlah, mutu, keseimbangan gizi dan komposisi/anekaragam pangan).

Pada tahun 2019 Score PPH Ketersediaan mencapai skor 88 yang diperoleh dari formulasi penghitungan Analisis Ketersediaan Pangan berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM). Neraca Bahan Makanan (NBM) menganalisis situasi ketersediaan pangan di suatu negara/wilayah dalam kurun waktu tertentu berdasarkan aspek penyediaan dan pemanfaatan pangan. Hasil dari Neraca Bahan Makanan tersebut adalah jumlah pangan yang tersedia di pasar untuk dikonsumsi pada kurun waktu tertentu dalam bentuk energi per kg/kapita/hari, protein per g/kapita/hari dan lemak per g/kapita/hari. Semakin tinggi skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan akan semakin beragam gizi pangan yang tersedia untuk di konsumsi masyarakat.

Situasi ketersediaan pangan NBM memberikan gambaran situasi ketersediaan pangan secara rata-rata wilayah, dan tidak menggambarkan situasi ketersediaan pangan individu. Dengan formulasi penghitungan capaian indikator kinerja yaitu Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dibagi target Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan x 100%.

1. Perbandingan antara target dengan realisasi tahun 2019.

Berdasarkan RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2017 – 2022, target indikator sasaran Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan pada tahun 2019 adalah skor 87. Sedangkan realisasi skor yang diperoleh dari Bidang Ketahanan Pangan melalui hasil Analisis Ketersediaan Pangan berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) diperoleh Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan sebesar skor 88.

Bila dilihat dari realisasi Skor PPH Ketersediaan yang ada di Kabupaten Barito Kuala masih belum mencapai Skor PPH Ketersediaan Ideal (skor 100), akan tetapi untuk capaian target Indikator Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala tahun 2019 adalah 101,15 % karena target Skor PPH Ketersediaan yang akan dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah Skor 87 dan menggambarkan bahwa ketersediaan pangan di Kabupaten Barito Kuala cukup beragam gizi pangannya.

Dari hasil analisis ketersediaan berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) tahun 2019, bahwa di kabupaten Barito Kuala ketersediaan energi 5.183 kkal/kap/hari dengan ketersediaan protein 226 gr/kap/hari, sedangkan standar (rekomendasi Widiyakarya Nasional Pangan dan gizi (WNPG) X tahun 2012 angka kecukupan energi 2.400 kkal/kap/hr dan kecukupan protein 63 gr/kap/hr. Hal ini menggambarkan bahwa ketersediaan energi dan protein tahun 2019 di kabupaten Barito Kuala telah melebihi target standar kecukupan energi dan protein. Daftar hasil analisis “terlampir”.

Dengan demikian capaian indikator kinerja “Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan” mencapai 101,15% ($88/87 \times 100\%$). Untuk melihat capaian sasaran strategis “Meningkatnya Kemandirian Pangan” ada 1 indikator kinerja yang digunakan, yaitu Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan. Sehingga rata rata capaian kinerja sasaran adalah 101,15%, predikat nilai capaian kinerja “Sesuai Target” dan predikat capaian kinerja “Sangat Baik”

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun 2019 dengan tahun sebelumnya (awal Renstra)

Realisasi Kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan tahun 2019 sebesar skor 88, sedangkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan pada tahun 2018 sebesar skor 86.

Disini dapat dilihat, bahwa Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan mengalami kenaikan sebesar 2,33%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2019 Dengan Target Akhir Renstra.

Realisasi Kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan tahun 2019 sebesar skor 88, sedangkan target Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan pada akhir RENSTRA sebesar skor 90. Sehingga capaian indikator tahun 2019 dibanding dengan target akhir renstra sebesar 97,78%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2019 dengan Standart Nasional

Realisasi Kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan tahun 2019 sebesar skor 88, sedangkan Capaian Kinerja Nasional Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan sebesar skor 83,04. Terdapat selisih lebih tinggi skor PPH Ketersediaan kabupaten sebesar skor 4,96. Sehingga selisih capaian indikator tahun 2019 dibanding dengan Standar Nasional sebesar 5,64%. Hal ini menggambarkan bahwa kondisi keragaman gizi dan ketersediaan pangan di Kabupaten Barito Kuala lebih beragam dibanding keadaan di tingkat pusat.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Kegagalan Kinerja Serta Solusi Yang Dilakukan

Dari capaian indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan menunjukkan adanya keberhasilan dari target yang

ingin dicapai. Keberhasilan capaian kinerja tahun 2019 pada Sasaran “Meningkatnya Kemandirian Pangan” ditunjang dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan dinas melalui Bidang Ketahanan Pangan berupa pembinaan kelompok lumbung pangan masyarakat, pembinaan kelompok afinitas dan koordinasi lintas sektor dalam rangka penyediaan data dalam penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) serta dukungan dalam penyediaan produksi pangan seperti umbi-umbian, sayuran dan buah, pangan hewani, kacang-kacangan.

Dalam pencapaian target kinerja juga terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu koordinasi yang dilakukan mencakup koordinasi lintas sektor dengan berbagai kesibukan masing masing menyebabkan proses pengumpulan data mengalami keterlambatan dari jadwal yang sudah ditargetkan.

Dari permasalahan tersebut, maka perlu adanya komitmen dan koordinasi yang baik dari lintas sektor, sehingga data bisa disajikan tepat waktu.

6. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Untuk Pencapaian

Indikator Kinerja Utama

Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan sebesar skor 88 dialokasikan dana dalam DPA Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebesar Rp. 714.301.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 703.541.500,- atau sebesar 98,49%, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 10.760.000,- atau 1,51%. (100% - 98,49% = 1,51%)

7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Kinerja

Untuk menunjang pencapaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Kemandirian Pangan dengan Indikator Kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dituangkan dalam Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) melalui kegiatan :

a. Pengembangan Lumbung Pangan Desa

Perwujudan kemandirian pangan melalui upaya mempertahankan/mengkondisikan ketersediaan pangan yang stabil di setiap saat dan setiap waktu dapat di lakukan melalui manajemen pengelolaan cadangan pangan yang berkesinambungan.

Salah satu upaya pemerintah dalam mendukung tegaknya pilar ketahanan pangan yaitu melalui pemberdayaan lumbung pangan masyarakat.

Cadangan Pangan Merupakan Aspek Penting Dalam Ketahanan Pangan :

1. Penduduk semakin bertambah, penduduk miskin masih banyak, maka permintaan pangan meningkat.
2. Kelangkaan dan kompetisi pemanfaatan sumberdaya (tanah, air dan perairan) terus berlanjut maka peningkatan produksi pangan semakin sulit.

3. Dampak Anomali iklim semakin sulit diprediksi berpotensi menimbulkan ketidakpastian produksi (gagal panen, banjir, kemarau panjang) dan kejadian bencana.
4. Banyaknya kejadian darurat memerlukan adanya cadangan pangan untuk pasca bencana penanganan rawan pangan bantuan pangan wilayah.

Tujuan dilaksanakannya Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Desa adalah :

1. Memfasilitasi masyarakat dalam stabilitas penyediaan pangan.
2. Meningkatkan kemampuan kelembagaan lumbung pangan sebagai salah satu penggerak ekonomi pedesaan.
3. Mengembangkan sumber pendapatan petani melalui usaha yang berbasis lumbung pangan.
4. Mewujudkan ketahanan di tingkat RT melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pangan yang cukup.
5. Meningkatkan sumberdaya manusia dan ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan kepengurusan lumbung pangan masyarakat maupun pengelolaan ketersediaan cadangan pangan masyarakat.

Pada kegiatan ini dilaksanakan pembinaan kelompok lumbung pangan masyarakat melalui pendampingan kelompok dan pertemuan pengurus lumbung untuk

membahas permasalahan dan memantau stok yang ada di lumbung masyarakat.



Gambar 1. Rapat Pertemuan Pengurus Lumbung Pangan Masyarakat, Pembinaan Kelompok Lumbung Dan Evaluasi Lumbung Pangan Masyarakat

b. Pengembangan Desa Mandiri Pangan

Desa Mandiri Pangan adalah desa yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi pangan dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan. Desa yang terlibat adalah desa yang tergolong rawan pangan berdasarkan analisis situasi pangan dan gizi dan peta ketahanan dan kerentanan pangan (FSVA).

Tujuan diselenggarakannya kegiatan Pertemuan desa mandiri pangan adalah :

1. Meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin perdesaan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang

dimiliki atau dikuasainya secara optimal, dalam mencapai kemandirian pangan rumah tangga dan masyarakat.

2. Pembinaan terhadap kelompok afinitas, Desa Mandiri Pangan dan Kawasan Desa Mandiri Pangan

Pada kegiatan ini dilaksanakan pertemuan kelompok afinitas dalam hal ini kelompok desa mandiri pangan untuk mencari alternatif peluang dan pemecahan masalah serta mampu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumberdaya alam secara efisien dan berkelanjutan menuju kemandirian pangan.



Gambar 2. Kegiatan Pertemuan Kelompok Afinitas Desa Mandiri Pangan

c. Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah

Aspek penting dari terciptanya ketahanan pangan yang tangguh adalah Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi yang merupakan suatu sistem pengelolaan informasi secara sistematis dan berkelanjutan guna mendukung perencanaan dan penetapan langkah-langkah penanggulangan segera, jangka pendek, dan jangka panjang berkaitan dengan timbulnya masalah pangan dan

gizi. Melalui penyusunan SKPG ini kemungkinan timbulnya masalah pangan dan gizi dapat diantisipasi sedini mungkin sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan yang tepat waktu dan tepat sasaran.

Tujuan diselenggarakannya kegiatan laporan Kondisi Ketahanan Pangan daerah ini adalah :

1. Menganalisis data ketersediaan pangan melalui Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG).
2. Koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan proses pengumpulan , pengolahan, penyampaian, dan penyebaran informasi data-data ketersediaan pangan.
3. Mengantisipasi perkembangan dan peningkatan harga pangan menjelang hari-hari besar keagamaan (HBKN)
4. Mengantisipasi dan mengendalikan daerah-daerah yang terindikasi rawan pangan.

Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah merupakan suatu kegiatan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala yang bertujuan memonitoring dan mengevaluasi data pangan di Kabupaten Barito Kuala.

Untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut dibentuk Tim Teknis Kabupaten. Tim Teknis Kabupaten mempunyai tugas menyampaikan laporan berkala (setiap bulan), semester (6 bulan) dan tahunan meliputi aspek ketersediaan,

distribusi pola konsumsi pangan, indikator kerawanan pangan serta sistem kewaspadaan pangan dan gizi serta mengkoordinasikannya dengan agenda rapat koordinasi Tim Teknis untuk membahas permasalahan dan diupayakan pemecahannya sesuai dengan kewenangan untuk perumusan kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten Barito Kuala di bulan dan tahun berikutnya.



Gambar 3. Rapat Pertemuan Dewan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Barito Kuala



Gambar 4. Rapat Apresiasi Penyusunan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)



Gambar 5. Pelatihan Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Tingkat Kabupaten Tahun 2019

d. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang ketahanan pangan yaitu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

Pemerintah Kabupaten sebagai penanggung jawab dalam mengatasi kelangkaan akses pangan pada saat masyarakatnya menghadapi gagal panen ataupun panceklik melalui pengembangan cadangan pangan daerah.

Tujuan diselenggarakannya kegiatan pengembangan cadangan pangan daerah ini adalah :

1. Upaya mewujudkan ketahanan pangan masyarakat di Kabupaten Barito Kuala yaitu dengan melaksanakan penyelenggaraan pengadaan cadangan pangan daerah Kabupaten Barito Kuala dalam bentuk penyimpanan, perawatan, pengamanan dan penyaluran beras bagi masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana dan gizi buruk.
2. Meningkatkan ketersediaan pangan di kabupaten barito kuala untuk memenuhi target pengembangan cadangan pangan pemerintah yang di targetkan 100 ton dan untuk mendukung

dan mencapai tujuan nasional yaitu Negara Indonesia sebagai lumbung pangan nasional

Pada kegiatan ini Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan bekerjasama dengan Bulog melaksanakan pengadaan beras sebanyak 11 ton untuk Cadangan Pangan Daerah. Disamping itu juga dilaksanakan pendampingan terhadap Gapoktan pengelola cadangan pangan daerah dengan melakukan pendampingan terhadap administrasi dan pemantauan terhadap stok yang ada di lumbung.

Jumlah keseluruhan cadangan pangan pemerintah kabupaten barito kuala sampai tahun 2019 ini adalah berjumlah 22 Ton beras yang di titipkan di gudang telaga biru Perum Bulog Divre kalsel dengan Berita Acara Penitipan Beras yang di tandatangani oleh kedua belah pihak yaitu antara Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan Perusahaan Umum Bulog Divre Kalimantan Selatan. Dan 39.992 ton Gabah Kering Giling yang ada dan dikelola oleh kelompok lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Gawi Bersama Kecamatan Bakumpai. Yang jika di konversikan ke beras di kali 64,02 % yaitu sekitar 25,602 Ton. Jadi jumlah keseluruhan cadangan pangan pemerintah daerah kabupaten barito kuala apabila di konversikan ke beras menjadi 47,602 ton.



Gambar 6. Survey dan monitoring bersama ke gudang telaga biru antara Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan Perum Bulog Divre Kalsel

e. Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan tambahan pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan pembuatan makanan atau minuman.

Melalui panel data harga pangan akan di peroleh gambaran dinamika perkembangan harga pangan dari waktu ke waktu dan dapat memprediksi kecenderungan harga pangan ke depan. Dengan demikian memudahkan dalam antisipasi tindakan yang diperlukan.

Tujuan dari kegiatan pemantauan dan analisis harga pangan pokok (panel harga pangan) adalah :

1. Menyediakan data/ informasi yang cepat dan akurat tentang harga dan pasokan pangan sebagai bahan deteksi dini guna mengantisipasi terjadinya gangguan distribusi dan harga pangan.
2. Menganalisa harga dan pasokan pangan secara periodik dari kecamatan sampai kabupaten sebagai bahan perumusan kebijakan di pusat dan daerah.

Pada kegiatan ini dilaksanakan pemantauan terhadap 6 pasar sampel terkait harga pangan dan pemantauan terhadap 10 produsen gabah (penggilingan) terkait harga gabah yang dijual. Dari hasil pemantauan ini diperoleh data harga pangan yang digunakan sebagai bahan penghitungan analisis harga pangan pokok.

Hasil analisis harga dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan di bidang pangan, khususnya terkait dengan upaya perumusan kebijakan stabilisasi harga dan peningkatan produksi pangan untuk menjamin kestabilan ketersediaan pangan. Selain itu, hasil analisis harga juga dapat digunakan untuk membuat peramalan harga suatu komoditas di masa yang akan datang.



Gambar 7. Kegiatan Pemantauan Harga Bersama Petugas Enumerator
Harga Kecamatan Dan Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan
Kabupaten

SASARAN STRATEGIS 2. MENINGKATNYA DIVERSIFIKASI PANGAN

Sasaran “Meningkatnya Diversifikasi Pangan” adalah merupakan pengimplementasian dari Misi 2 pada RPJMD yaitu **MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI INOVASI TEKNOLOGI BERBASIS PERTANIAN** pada sasaran RPJMD “Meningkatnya produksi pelaku usaha dan tingkat produktivitas ekonomi masyarakat” dengan indikator RPJMD Indeks Gini dan PDRB per kapita. Untuk merealisasikan sasaran “Meningkatnya Diversifikasi Pangan” ditetapkan dengan Indikator Kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi didefinisikan sebagai proporsi kelompok pangan yang menggambarkan keragaman dan keseimbangan pangan dalam kondisi konsumsi pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat konsumsi pangan. Skor PPH Konsumsi diperoleh dari Analisis pola konsumsi pangan masyarakat. Pola konsumsi pangan ideal digambarkan dengan skor PPH 100. Semakin tinggi skor PPH Konsumsi, semakin beragam dan seimbang gizi pangan yang dikonsumsi.

Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi digunakan untuk menilai situasi konsumsi pangan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat.

Pada tahun 2019 Skor PPH Konsumsi mencapai skor 83,80 yang diperoleh melalui Survey Konsumsi Pangan pada 3 (tiga) wilayah karakteristik yaitu wilayah pertanian, perikanan dan perkotaan. Hasil survey tersebut kemudian diolah melalui aplikasi Analisis Data Survey Konsumsi Pangan Wilayah Kabupaten/Kota.

1. Perbandingan antara target dengan realisasi tahun 2019

Berdasarkan RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2017 – 2022, indikator sasaran Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi dengan target skor 84,9. Sedangkan realisasi skor yang diperoleh dari Bidang Ketahanan Pangan melalui Analisis Data Survey Konsumsi Pangan diperoleh Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi sebesar skor 83,8. Daftar hasil analisis “terlampir”. Dari hasil Analisis Data Survey Konsumsi Pangan menunjukkan bahwa keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan di Kabupaten Barito Kuala masih belum ideal karena Skor PPH Konsumsi masih dibawah skor ideal 100. Jika dilihat dari target, Skor PPH konsumsi tahun 2019 yang ingin dicapai adalah skor 84,9 sedangkan realisasi Skor PPH Konsumsi

adalah skor 83,8 atau sebesar 98,70 % dengan formulasi penghitungan Capaian Indikator Kinerja Realisasi Skor PPH Konsumsi dibagi Target skor PPH Konsumsi x 100%.

Untuk melihat capaian sasaran strategis “Meningkatnya Diversifikasi Pangan”, maka ada 1 indikator kinerja yang digunakan, yaitu Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi. Rata rata capaian kinerja sasaran adalah 98,70% dengan predikat nilai capaian kinerja “Tidak Tercapai” dan predikat capaian kinerja “Sangat Baik”

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun 2019 dengan tahun sebelumnya

Realisasi Kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi tahun 2019 sebesar skor 83,8, sedangkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi pada tahun 2017 sebesar skor 83,3 dan skor pada tahun 2018 sebesar 83,4 . Disini dapat dilihat bahwa Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi mengalami kenaikan sebesar 0,48% dibanding tahun sebelumnya meskipun tidak mencapai target yang ditetapkan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2019 Dengan Target Akhir Renstra.

Realisasi Kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi tahun 2019 sebesar skor 83,8, sedangkan target Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi pada akhir RENSTRA sebesar

skor 87,5. Sehingga capaian indikator tahun 2019 dibanding dengan target akhir renstra sebesar 95,77%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2019 dengan Standart Nasional

Realisasi indikator sasaran “Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi” kabupaten adalah skor 83,8 sedangkan capaian nasional sebesar skor 90,7. Terdapat selisih lebih rendah skor PPH Konsumsi kabupaten sebesar skor 6,9. Sehingga selisih capaian indikator tahun 2019 dibanding dengan Standar Nasional sebesar 8,23%. Hal ini menggambarkan bahwa kondisi keragaman konsumsi pangan di Kabupaten Barito Kuala masih kurang beragam dibanding dengan kondisi nasional.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Kegagalan Kinerja Serta Solusi Yang Dilakukan

Keberhasilan capaian Indikator Sasaran “Meningkatnya Diversifikasi Pangan” tahun 2019 ditunjang beberapa faktor pola konsumsi, antara lain pengetahuan masyarakat, budaya, ketersediaan pangan, dan keterjangkauan harga pangan. Faktor ketersediaan kelompok pangan juga mempengaruhi pola konsumsi, karena jenis pangan yang banyak tersedia dan terjangkau daya belinya di desa, akan sangat besar dikonsumsi. Dari capaian indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi menunjukkan belum berhasilnya pencapaian target

yang ingin dicapai. Ketidakberhasilan tersebut disebabkan karena terdapat selisih yang cukup tinggi pada kelompok konsumsi pangan tertentu dibandingkan dengan standar kecukupan konsumsi, antara lain :

- Masih tingginya konsumsi beras
- Masih rendahnya konsumsi umbi umbian, sayur dan buah
- Masih rendahnya pemanfaatan sumber pangan lokal seperti umbi, jagung dan sagu
- Pola konsumsi masyarakat yang sukar dirubah terutama dalam konsumsi sayur dan buah
- Ketersediaan pangan untuk kelompok pangan tertentu masih kurang, misalnya di wilayah perikanan sayur dan buah kurang tersedia

Apabila konsumsi sayur dan buah tinggi skor PPH Konsumsi akan meningkat karena bobot dari kelompok pangan sayur dan buah dalam skor PPH konsumsi tinggi.

Dari permasalahan tersebut, maka solusi yang akan dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah :

- Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat menuju skor PPH konsumsi yang ideal agar hidup menjadi sehat, aktif dan produktif
- Meningkatkan pembinaan pada masyarakat tentang pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman

melalui sosialisasi di kelompok wanita tani, PKK dan posyandu.

- Melaksanakan kegiatan Pemanfaatan pekarangan (Kawasan Rumah Pangan Lestari) sehingga masyarakat dapat menyediakan pangan dan gizi secara mandiri.

6. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Untuk Pencapaian

Indikator Kinerja Utama

Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi sebesar skor 84,9 dialokasikan dana dalam DPA Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebesar Rp. 362.169.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 348.573.402,- (96,25%), sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 13.596.098,- atau 3,75% ($100\% - 96,25\% = 3,75\%$)

7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan

Atau Kegagalan Kinerja

Untuk menunjang pencapaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Diversifikasi Pangan dengan Indikator Kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi dituangkan dalam Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) dengan kegiatan :

a. Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan

Kegiatan analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan bertujuan memantau dan menganalisis pola konsumsi masyarakat Kabupaten Barito Kuala. Sasaran kegiatan

adalah 270 responden rumah tangga dari 27 Desa pada 9 kecamatan berdasarkan karakteristik wilayah agroekologi yang meliputi pertanian, perikanan dan wilayah lainnya/kota.

Kualitas konsumsi pangan penduduk di suatu wilayah, antara lain ditunjukkan oleh pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang menggambarkan kuantitas maupun kualitas serta keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan antar kelompok pangan.

Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi dalam jumlah, maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama.

Hasil analisis pola konsumsi pangan sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Skor PPH	Skor	83.3	83.8
2	Konsumsi Energi	Kkal/kap/hari	1970.3	1983.7
3	Konsumsi Protein	gram/kap/hari	56.8	60.6
4	Konsumsi Beras	gram/kap/hari	116.8	116.4



Gambar 8. Survey Konsumsi dan Pertemuan Analisis Pola Konsumsi Pangan kerjasama dengan Petugas Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala

b. Pameran Ketahanan Pangan dan Lomba Cipta Menu Pangan Tk. Kabupaten dan Propinsi

Dalam rangka mendukung upaya penganekaragaman pangan dan konsumsi pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) dilaksanakan secara berjenjang Festival Pangan Lokal B2SA dari tingkat Nasional, Provinsi hingga tingkat Kabupaten.

Pada kegiatan ini dilaksanakan Festival Pangan Lokal B2SA (Beragam, Bergizi seimbang dan Aman) dan Lomba Masak Ikan, dengan tujuan meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan kreativitas masyarakat dalam mengkonsumsi dan mengolah pangan B2SA/kreasi olahan ikan. Pada lomba B2SA memanfaatkan sumber karbohidrat non beras dan non terigu, dengan tujuan pola konsumsi beras akan menurun. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan Pameran Hari Jadi Kabupaten Barito Kuala, Festival Pangan Lokal dan Lomba Masak Ikan tingkat Kabupaten Barito Kuala.

TP PKK Kab. Barito Kuala berhasil meraih Juara II untuk Lomba Festival Pangan Lokal B2SA Tk. Provinsi Kalsel, untuk Lomba Masak Ikan masih belum berhasil. Menu B2SA dalam Lomba tingkat kabupaten diharapkan dapat diterapkan masyarakat dan dikomersilkan sehingga mampu meningkatkan gizi dan ekonomi keluarga.

Sebagai ajang promosi pangan lokal dan ketahanan pangan, dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan juga berpartisipasi di beberapa pameran yaitu :

1. Pameran Apkasi Otonomi Expo (AOE) di Jakarta pada bulan Juli 2019
2. Pameran Kalsel Expo di Banjarbaru pada bulan Agustus 2019
3. Pameran Hari Pangan Sedunia (HPS) di Kendari pada bulan November 2019.



Gambar 9. Festival Pangan Lokal tingkat Kabupaten Barito Kuala



Gambar 10. Pameran Hari Jadi Kabupaten Barito Kuala

c. Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan

Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan merupakan kegiatan implementasi dari Program Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan dilakukan melalui upaya pemberdayaan wanita untuk mengoptimalkan manfaat pekarangan sebagai sumber pangan keluarga. Upaya ini dilakukan dengan membudidayakan berbagai jenis

tanaman sesuai kebutuhan keluarga seperti aneka umbi, sayuran, buah, serta budidaya ternak dan ikan sebagai tambahan untuk ketersediaan sumber karbohidrat, vitamin, mineral, dan protein bagi keluarga pada suatu lokasi kawasan perumahan/warga yang saling berdekatan.

Adapun tujuan kegiatan adalah :

- Meningkatkan partisipasi kelompok wanita dalam penyediaan sumber pangan dan gizi keluarga melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai penghasil sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral untuk konsumsi keluarga.
- Meningkatkan kesadaran, peran, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang B2SA serta mengurangi ketergantungan terhadap bahan pangan pokok beras.

Kegiatan berupa Bantuan benih tanaman dan pembinaan kegiatan pemanfaatan pekarangan/KRPL kepada Kelompok Wanita Tani.

Paket bantuan yang diterima per kelompok adalah :

- Benih Cabe 8 bgks (@ 10 gram)
- Benih Tomat 8 bgks (@ 5 gram)
- Benih Terong 4 bgks (@ 10 gram)
- Benih Sawi 5 bgks (@ 25 gram)
- Pupuk Kandang 75 karung
- Pupuk NPK 50 kg
- Kapur Pertanian 100 Kg
- Polybag 750 bh

**Kelompok Wanita Tani Pelaksana Kegiatan Pemanfaatan
Pekarangan untuk Pengembangan Pangan /Kawasan Rumah
Pangan Lestari (KRPL)**

NO.	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN	IDENTITAS KELOMPOK KRPL		JUMLAH ANGGOTA (Org)
			NAMA KELOMPOK	NAMA KETUA	
1	Tabunganen	Sungai Telan Besar	KWT RIZKI BERSAMA	Dahriah	31
2	Jejangkit	Jejangkit Muara	KWT DAHLIA	Darmawati	30
3	Jejangkit	Bahandang	KWT MAWAR	Sanawiyah	30
4	Mandastana	Terantang	KWT BERKAT MUFAKAT	Maimunah	25
5	Bakumpai	Banitan	KWT BUNGA TERATAI	Arbainah	30



Gambar 8. Kegiatan di KWT Bunga Tanjung Desa Banitan Kecamatan Bakumpai

d. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

Pada kegiatan ini diarahkan pada pengawasan keamanan pangan, yaitu melaksanakan kegiatan penyuluhan keamanan pangan dalam hal ini sasarannya adalah kelompok wanita tani (KWT) pelaksana kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan dan Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Kegiatan yang kedua adalah melaksanakan pengujian terhadap komoditas sayuran di pasar Marabahan untuk parameter residu pestisida dan mikroba E.Coli. Berikut komoditas yang diuji :

No.	Komoditas	Parameter Uji	Status
1	Bayam	Residu Pestisida	MS
2	Sawi	Residu Pestisida	MS
3	Terong	Residu Pestisida	MS
4	Kacang Panjang	Residu Pestisida	MS
5	Tomat	Residu Pestisida	MS
6	Bawang Merah	Residu Pestisida	MS

7	Cabe Rawit	Residu Pestisida	MS
8	Kubis/Kol	Mikroba E. Coli	MS
9	Tomat	Mikroba E. Coli	MS
10	Ketimun	Mikroba E. Coli	MS



Gambar 9. Pengambilan Sampel Pangan Untuk Pengujian Laboratorium

SASARAN STRATEGIS 3. MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN

Sasaran “Meningkatnya Produksi Perikanan” adalah merupakan pengimplementasian dari Misi 2 pada RPJMD yaitu **MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI INOVASI TEKNOLOGI BERBASIS PERTANIAN** pada sasaran RPJMD “Meningkatnya budidaya dan Diversifikasi Usaha Sektor Pertanian” dengan indikator RPJMD “Pertumbuhan Sektor Pertanian”. Untuk merealisasikan sasaran “Meningkatnya Produksi Perikanan” ditetapkan dengan Indikator Kinerja Jumlah Produksi Perikanan.

Jumlah produksi perikanan adalah jumlah keseluruhan dari produksi perikanan budidaya ikan yang berasal dari tambak, kolam,

karamba dan Karamba Jaring Apung (KJA), Mina padi ditambah dengan jumlah produksi penangkapan ikan yang berasal dari penangkapan perairan laut dan perairan umum.

Penghitungan Jumlah Produksi Perikanan pada tahun 2019 diperoleh melalui Sistem Satu Data milik Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimana pengumpulan data dilakukan oleh enumerator yang terdiri dari Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Perikanan Bantu. Data survey dari enumerator kemudian diolah melalui penghitungan statistik. Hasil dari penghitungan statistik tersebut kemudian divalidasi oleh validator statistik dinas dengan membandingkan data yang ada pada dinas.

1. Perbandingan antara target dengan realisasi tahun 2019.

Berdasarkan RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2017 – 2022, target indikator sasaran Jumlah produksi perikanan pada tahun 2019 adalah 19.716 ton, sedangkan realisasi jumlah produksi perikanan yang diperoleh dari sistem Satu Data melalui hasil penghitungan statistik budidaya dan statistik penangkapan sebesar 19.441,84 ton yang terdiri dari penambahan jumlah produksi budidaya sebanyak 10.629,61 ton atau 102,54% dari target 10.366 ton dan produksi penangkapan sebanyak 8.812,23 ton atau 94,25% dari target 9.350 ton. Dari hasil penghitungan statistik, produksi perikanan tangkap tidak mencapai target yang diinginkan. Hal ini disebabkan adanya

kemarau panjang yang menyebabkan perubahan kualitas air dan kekeringan. Hasil penghitungan statistik budidaya dan penangkapan “terlampir”.

Dengan demikian capaian indikator kinerja “Jumlah Produksi Perikanan” mencapai 98,61% yang diperoleh dari Jumlah produksi perikanan dibagi Target produksi perikanan x 100% (19.441,84 ton/ 19.716 ton x 100%).

Untuk melihat capaian sasaran strategis “Meningkatnya Produksi Perikanan” ada 1 indikator kinerja yang digunakan, yaitu “Jumlah Produksi Perikanan”. Sehingga rata rata capaian kinerja sasaran adalah 98,61% dengan predikat nilai capaian kinerja “Tidak Tercapai” dan predikat capaian kinerja “Sangat Baik”.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun 2019 dengan tahun sebelumnya

Realisasi Kinerja Jumlah Produksi Perikanan tahun 2019 sebanyak 19.441,84 ton, sedangkan Jumlah Produksi Perikanan pada tahun 2018 sebanyak 19.921 ton. Disini dapat dilihat, bahwa Jumlah Produksi Perikanan mengalami penurunan sebesar 2,41%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2019 Dengan Target Akhir Renstra.

Realisasi Kinerja Jumlah Produksi Perikanan tahun 2019 sebanyak 19.441,84 ton. Sampai dengan tahun 2019 jumlah

produksi perikanan sebanyak 39.362,84 ton, sedangkan target Jumlah Produksi Perikanan pada akhir RENSTRA sebanyak 99.115 ton. Sehingga capaian indikator sampai dengan tahun 2019 dibanding dengan target akhir renstra sebesar 39,71%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2019 dengan Standart Nasional

Capaian indikator sasaran “Jumlah Produksi Perikanan” kabupaten sebanyak 19.441,84 ton, sedangkan capaian jumlah produksi perikanan nasional 38.300.000*. Hal ini menggambarkan jumlah produksi perikanan Kabupaten Barito Kuala hanya 0,05% dari jumlah produksi perikanan nasional yang meliputi produksi perikanan tangkap dan budidaya.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Kegagalan Kinerja Serta Solusi Yang Dilakukan

Dari capaian indikator kinerja Jumlah Produksi Perikanan menunjukkan adanya keberhasilan dari target yang ingin dicapai. Keberhasilan capaian kinerja tahun 2019 pada Sasaran “Jumlah Produksi Perikanan” ditunjang dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan dinas melalui Bidang Budidaya dan Bidang Penangkapan berupa :

- Bantuan sarana dan prasarana budidaya kepada kelompok budidaya ikan berupa benih dan pakan melalui dana APBD

dan Percontohan Nila di kolam, Budidaya lele dan patin di kolam yang disalurkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

- Bantuan alat tangkap berupa mesin kapal kepada kelompok penangkapan melalui dana APBD dan bantuan berupa kapal < 3GT beserta mesin, alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
- Dilaksanakannya pendampingan terhadap kelompok budidaya melalui sosialisasi melaksanakan Cara Berbudidaya Ikan yang Baik dan temu usaha yang merupakan ajang berkumpulnya para pelaku usaha perikanan untuk berbagi informasi. Pendampingan juga dilakukan terhadap kelompok perikanan tangkap melalui bintek pengembangan usaha perikanan tangkap bagi nelayan.
- Menjaga kelestarian sumberdaya perikanan dengan penanganan kasus illegal fishing melalui pemberkasan kasus. Sampai akhir tahun 2019 tidak ada kasus yang ditangani oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam melakukan aktifitas penangkapan sudah mulai baik didukung peran serta kelompok masyarakat pengawas dalam menjaga aktifitas penangkapan.
- Untuk menjaga hasil produksi perikanan supaya tidak cepat rusak dan merangsang peningkatan konsumsi ikan,

dilaksanakan diversifikasi olahan ikan melalui demo pengolahan ikan pada masyarakat nelayan.

Dalam pencapaian sasaran ini juga ada permasalahan yang dihadapi, antara lain :

- Adanya perubahan kualitas air pada sungai akibat perubahan cuaca yang menjadi lokasi karamba dan karamba jaring apung menyebabkan mortalitas yang cukup tinggi
- Kurangnya koordinasi antara penyuluh perikanan sebagai enumerator data dengan pihak dinas, menyebabkan penghitungan statistik tidak sesuai dengan waktu yang ditargetkan
- Kurangnya skill masyarakat dalam melaksanakan cara budidaya ikan yang baik (cbib)
- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian perikanan

Dari permasalahan tersebut maka perlu dilakukan :

- Pengecekan kualitas air secara berkala
- Melaksanakan rapat/pertemuan setiap bulan dengan semua karyawan/ti dinas dan penyuluh perikanan untuk melakukan sharing informasi
- Melakukan pendampingan kelompok pembudidaya ikan tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik, manajemen dan administrasi kelompok

- Melaksanakan razia illegal fishing sampai pemberkasannya

6. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Untuk Pencapaian

Indikator Kinerja Utama

Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja Jumlah Produksi Perikanan sebanyak 19.441,84 ton dialokasikan dana dalam DPA Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebesar Rp. 2.060.896.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.967.129.298,- atau sebesar 95,45%, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 93,767.502,- atau 4,55%. (100% - 95,45% = 4,55%).

7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan

Atau Kegagalan Kinerja

Untuk menunjang pencapaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Produksi Perikanan dengan Indikator Kinerja Jumlah Produksi Perikanan dituangkan dalam :

- ✚ Program Pengembangan Budidaya Perikanan yang didukung kegiatan :

a. Pengembangan Bibit Ikan Unggul

Dalam rangka untuk mewujudkan usaha budidaya dengan menerapkan sistem usaha berdaya saing dan berkelanjutan serta dengan berbasis pedesaan maka Balai Benih Ikan Sungai Kambat sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Ketahanan pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala berperan sebagai motor

penggerak dalam melaksanakan program budidaya ikan khususnya budidaya ikan air tawar. Keberadaan BBI Sungai Kambat mempunyai peranan 1) menerapkan dan menyebarluaskan teknologi pembenihan, 2) menyediakan dan menyalurkan benih ikan yang bermutu 3) penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada kegiatan ini dilaksanakan pembenihan ikan, pembinaan Unit Perbenihan Rakyat (UPR) dan peningkatan kualitas SDM dalam pembenihan ikan untuk meningkatkan produksi benih ikan. Benih yang dihasilkan dijual ke pembudidaya ikan dan hasil penjualan menjadi Pendapatan Asli Daerah.



Gambar 10. Kegiatan Pembenihan di BBI Sei. Kambat Kecamatan Cerbon

b. Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan

Pada kegiatan ini dilaksanakan pendampingan pada kelompok budidaya ikan melalui sosialisasi Cara Budidaya Ikan yang Baik dan dihadiri oleh 80 orang pembudidaya ikan. Disamping itu juga dilaksanakan Temu Usaha

Perikanan Budidaya dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pembudidaya ikan tentang pengembangan usaha budidaya ikan.



Gambar 11. Pelaksanaan Temu Usaha Bagi Pelaku Usaha Perikanan

- c. Revitalisasi perikanan budidaya di kawasan budidaya air tawar (APBD dan DAK)

Pada kegiatan ini dilaksanakan pengadaan sarana dan prasarana budidaya melalui dana APBD Kabupaten berupa pemberian benih dan pakan yang diberikan pada 4 kelompok pembudidaya ikan. Melalui Dana Alokasi Khusus juga dilaksanakan pengadaan sarana dan prasarana budidaya berupa Paket Percontohan Ikan yang diberikan kepada 13 kelompok pembudidaya ikan. Disamping itu juga dilakukan pendampingan kelompok pembudidaya ikan guna pemecahan masalah yang ada di kelompok.



Gambar 12. Bantuan Sarana dan Prasarana Budidaya

d. Peningkatan Produksi Perbenihan Ikan

Pada kegiatan ini dilaksanakan pengadaan pakan ikan sebagai penyediaan pakan ikan yang dipelihara untuk kurun waktu 1 tahun di Balai Benih Ikan Sungai Kambat Kecamatan Cerbon. Pakan yang disediakan meliputi pakan induk, pakan benih 1, 2 dan 3, pakan artemia.



Gambar 13. Pengadaan Pakan Ikan

✚ Program Pengembangan Perikanan Tangkap didukung dengan kegiatan :

- a. Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap
Pada kegiatan ini dilaksanakan pendampingan terhadap nelayan berupa bimbingan teknis pembinaan usaha perikanan tangkap terhadap 180 orang nelayan agar berkembang usahanya. Pendampingan dan pembinaan meliputi modal usaha, ijin usaha dan sosialisasi alat tangkap ramah lingkungan.



Gambar 14. Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Tangkap

- b. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (APBD dan DAK)

Pada kegiatan ini dilaksanakan pengadaan sarana dan prasarana penangkapan berupa mesin kapal kepada kelompok penangkapan melalui dana APBD dan bantuan berupa kapal < 3GT beserta mesin, alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan melalui Danan Alokasi Khusus (DAK).



Gambar 15. Bantuan Saranan dan Prasarana Penangkapan

✚ Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan dengan kegiatan :

- a. Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

Pada kegiatan ini dilaksanakan diversifikasi olahan agar hasil perikanan dapat bertahan lama dengan mengadakan demo pengolahan ikan terhadap 60 orang istri nelayan berupa pengolahan amplang dan pembuatan bakso ikan



Gambar 16. Demo Pengolahan Ikan Bagi Istri Nelayan

Dari penjabaran 3 (tiga) Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala di atas, capaian sasaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah berikut :

Tabel 3.2.5
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini dengan Capaian Tahun Lalu

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019	Selisih Capaian	Ket.
			Capaian	Capaian		
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor	86	88,00	2,33	
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	83,4	83,80	0,48	
3	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	19.921	19.441,84	(2,41)	

Tabel 3.2.6
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Target Renstra

No	Indikator SASARAN	Satuan	Relisasi 2019	Terget Ahir Renstra	Capaian (%)	Ket.
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor	88,00	90	97,78	
2.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	83,80	87,5	95,77	
3.	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	19.441,84	20.036	97,03	

Tabel 3.2.7**Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2019 dengan Capaian Provinsi dan Nasional**

No	Indikator SASARAN	Satuan	Relisasi 2019	Capaian Provinsi	Capaian Nasional	Ket.
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor	88,00	77,54	83,04*	
2.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	83,80	85,1	87,5	
3.	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	19.441,84	597.568,48	38.300.000*	* target produksi 2019

III. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 7.722.689.230,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 6.993.991.927,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 90,56 %.

Komposisi belanja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan untuk tahun 2019, sebagai berikut :

Tabel 3.3.1
Komposisi Belanja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	3.784.356.430,-	3.180.036.348,-	84,03
2	Belanja Langsung	3.938.332.800,-	3.813.955.579,-	96,84
Jumlah		7.722.689.230,-	6.993.991.927,-	90.56

Sumber : Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Tabel di atas memperlihatkan bahwa belanja langsung memberikan kontribusi sebesar 54,53% terhadap realisasi belanja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala tahun 2019, dan sisanya sebesar 45,47% disumbangkan belanja tidak langsung.

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Barito Kuala yang diperjanjikan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 3.137.367.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.019.244.200,- atau 96,23 %, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.2
Pagu dan Realisasi Anggaran
Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis
dan Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatnya kemandirian pangan	714.301.500,-	703.541.500,-	98,49
2	Meningkatnya diversifikasi pangan	362.169.500,-	348.573.402,-	96,25
3	Meningkatnya Produksi Perikanan	2.060.896.800,-	1.967.129.298,-	95,45
Jumlah		3.137.367.800,-	3.019.244.200,-	96,23

Sumber : Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk efektivitas pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan pada tahun 2019.

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3.3
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	
				Realisasi	%
1	Meningkatnya kemandirian pangan	1	101,15	703.541.500,-	98,49
2	Meningkatnya diversifikasi pangan	1	98,70	348.573.402,-	96,25
3	Meningkatnya Produksi Perikanan	1	98,61	1.967.129.298,-	95,45
	Jumlah	3	99,49	3.019.244.200,-	96,23

Capaian kinerja sasaran rata rata mencapai 99,49% dengan realisasi keuangan yang mendukung tercapainya kinerja sasaran

sebesar 96,23%. Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2019 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

IV. Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat 1 (satu) sasaran menunjukkan pencapaian 100% sedangkan 2 (dua) sasaran kurang dari 100%. Adanya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat cukup tinggi.

Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.4.1

**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran
Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Tahun 2019**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja Kinerja Sasaran	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kemandirian pangan	1	101,15	98,49	1,51
2	Meningkatnya diversifikasi pangan	1	98,70	96,25	3,75
3	Meningkatnya Produksi Perikanan	1	98,61	95,45	4,55
	Jumlah	3	99,49	96,23	3,77

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagai bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan pembangunan Urusan Pangan dan Perikanan memiliki dan berperan dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Barito Kuala yaitu : ***Terwujudnya Kabupaten Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera*** sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.

Proses pembangunan tidak terlepas dari visi dan misi yang sudah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Perangkat Daerah merupakan satuan unit kerja yang melaksanakan tujuan dan sasaran pemerintahan daerah sebagai implementasi visi dan misi kepala daerah.

Visi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala untuk tahun 2013-2017 adalah :

**“Pembangunan Ketahanan Pangan dan Perikanan yang Maju,
Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan
Masyarakat”**

Untuk mewujudkan Visi pembangunan Ketahanan Pangan dan Perikanan tersebut, maka misi yang diemban adalah :

- 1. Mengoptimalkan Stok Cadangan Pangan**
- 2. Meningkatkan Keragaman dan Nilai Tambah Konsumsi Pangan**
- 3. Mengoptimalkan pemanfaatan Sumberdaya Perikanan**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 ini dapat menggambarkan Keberhasilan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan.

Dalam tahun 2019 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupapten Barito Kuala menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ingin dicapai.

Secara rinci **pencapaian sasaran Tahun 2019** dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 101,15% atau sesuai target
2. Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 98,70% atau dibawah target
3. Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 98,61% atau melebihi target

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 (tiga) sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target dengan capaian nilai dalam kisaran 99,49%. Dalam Tahun Anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala DPA Perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 7.722.689.230,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 6.993.991.927,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 90,56%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2019 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 728.697.303,00,- atau 9,44%. Adapun anggaran belanja yang terkait dengan pencapaian sasaran tahun 2019 adalah sebesar Rp. 3.137.367.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.019.244.200,00 atau 96,23%.

